

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

**DIKLAT TEKNIK DAN MANAJEMEN
KEBIJAKAN PUBLIK**

Jakarta, 18 November - 3 Desember 1998

KEBIJAKAN PUBLIK

- Hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya (Anderson)
- Apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Thomas Dye)
- Suatu rangkaian tindakan yang saling berkaitan (Arnold Rose)
- Sejumlah aktivitas Pemerintah, baik dilakukan sendiri atau melalui lembaga lain, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (G. Peters)

KEBIJAKAN PUBLIK (2)

- Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran (Carl Friedrich)
- Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan (W.N. Dunn).

INFORMASI YANG POLICY RELEVANT

- **MASALAH KEBIJAKAN** adalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan pemerintah.
- **MASA DEPAN KEBIJAKAN** adalah pengaruh dari suatu pilihan tindakan yang mungkin berpengaruh terhadap pencapaian nilai, kebutuhan atau pemanfaatan kesempatan.
- **TINDAKAN KEBIJAKAN** adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dirancang atas dasar suatu alternatif kebijakan tertentu untuk mencapai hasil-hasil yang lebih diinginkan dimasa depan.

INFORMASI YANG POLICY RELEVANT (2)

- **HASIL KEBIJAKAN** adalah konsekuensi atau akibat yang nyata dari tindakan-tindakan kebijakan.
- **KINERJA KEBIJAKAN** adalah besarnya sumbangan atau pengaruh hasil kebijakan terhadap pemenuhan atau pencapaian nilai, kebutuhan atau kesempatan.

SISTEM KEBIJAKAN

Analisis kebijakan adalah salah seorang aktor dalam suatu sistem kebijakan publik.

- **SISTEM KEBIJAKAN** adalah keseluruhan tatanan kelembagaan di mana kebijakan-kebijakan dirumuskan, dan merupakan suatu jaringan yang terdiri atas 3 unsur yaitu: kebijakan-kebijakan publik, policy stakeholders, dan lingkungan kebijakan.
- **KEBIJAKAN PUBLIK** adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah tentang bidang atau isu kebijakan pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kriminalitas, dll.

MODEL KEBIJAKAN

Penampilan bagian-bagian tertentu suatu situasi problematis secara sederhana untuk kepentingan khusus. Seperti halnya masalah kebijakan adalah suatu *konstruksi mental* yang didasarkan atas konsepsualisasi dan spesifikasi dari unsur-unsur suatu situasi problematis, model kebijakan adalah juga suatu konsepsualisasi artifisial dalam bidang isu kebijakan, seperti energi, lingkungan, kemiskinan, kesenjangan, kesejahteraan, kriminalitas, dll.

MODEL KEBIJAKAN (2)

Model kebijakan dapat disajikan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematis, yang digunakan untuk menggambarkan, menerangkan dan memprediksi unsur-unsur dari suatu situasi problematis, serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan publik tersebut dengan merekomendasikan arah-arrah tindakan buat mengatasi masalah tertentu.

TIPE KEBIJAKAN PUBLIK

Model deskriptif dan model normatif. Atas dasar tujuannya model kebijakan dapat dibedakan antara model deskriptif dan model normatif.

Model deskriptif adalah untuk menerangkan dan memprediksikan sebab dan akibat dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk memonitor outcomes dari tindakan-tindakan kebijakan. Contoh: berbagai Indikator Pembangunan terbitan BPS ataupun berbagai instansi Pemerintah.

TIPE KEBIJAKAN PUBLIK (2)

Model normatif. Model ini selain untuk menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu. Beberapa model normatif yang sering digunakan dalam kebijakan publik antara lain adalah: model tentang tingkat optimal kapasitas pelayanan publik (mis. dalam bidang penerbangan SI tingkat ketepatan terbang 85%), inventory turnover rate (3 jam), target peningkatan sebesar PAD 10%.

TIPE MODEL KEBIJAKAN

Berdasarkan bentuk atau tampilannya, model kebijakan dapat dibedakan antara: model verbal, model simbolis, dan model prosedural.

Model verbal: adalah cara menampilkan model kebijakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, Presiden Habibie, pada sambutan tanggal 29 September 1998 di Lemhamnas menyatakan bahwa *“jika sebagian fungsi negara telah diemban oleh masyarakat madani, sedangkan fungsi-fungsi tertentu diambil alih oleh lembaga internasional, apa fungsi strategis yang harus dilaksanakan oleh negara?”*

TIPE MODEL KEBIJAKAN (2)

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan. Model simbolis seringkali disajikan sebagai suatu fungsi matematik.

$$PAD_{t+1} = a * (PDB)$$

TIPE MODEL KEBIJAKAN (3)

Model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan. Contoh paling baik dari model ini adalah model-model simulasi yang menunjukkan saling hubungan antara variabel-variabel kunci tentang suatu masalah kebijakan.

MASALAH DAN ISU KEBIJAKAN

- **Masalah kebijakan** (publik) adalah kebutuhan dan nilai yang belum terpenuhi atau kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan publik (David Dery).
- **Isu kebijakan** (publik) adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta cara-cara untuk memecahkannya (W.N. Dunn).

IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN

- **Pendekatan top-down.** Masalah yang dianalisis adalah masalah yang ditugaskan oleh atasan.
- **Pendekatan pragmatis.** Analisis merumuskan masalah bila merasa bahwa analisis memang diperlukan karena ada perbedaan pendapat tentang bagaimana cara mengatasi suatu masalah serta terdapat beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut.
- **Pendekatan kriteria sosial.** Analisis mencoba mencari ungkapan ketidakpuasan publik serta mencoba merumuskan masalah sosial yang perlu dipecahkan.

PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN

- 1 Fikirkan mengenai masalah yang hendak diatasi
- 2 Tetapkan batasan dari masalah.
- 3 Kumpulkan fakta dan informasi
- 4 Rumuskan tujuan dan obyektif
- 5 Identifikasi payung kebijakan (policy envelope)
- 6 Tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi
- 7 Tinjau kembali rumusan masalah yang telah disusun

ANALISIS PERUMUSAN MASALAH

- **Kalkulasi cepat (*back of the envelope calculations*)**
- **Analisis keputusan sesaat (*quick decision analysis*)**
- **Definisi operasional**
- **Analisis politik**

METODE PERUMUSAN MASALAH

- Analisis batasan masalah
- Analisis klasifikasi-silang
- Analisis hirarki
- Sinektik (synectics)
- Curah pendapat (brainstorming)
- Analisis multi-perspektif
- Analisis asumsional
- Pemetaan argumentasi

BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN

- **Analisis kebijakan prospektif** adalah analisis untuk menghasilkan atau mentransformasi informasi tindakan kebijakan diambil dan dilaksanakan.
- **Analisis kebijakan retrospektif** adalah analisis untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi setelah tindakan kebijakan dilaksanakan.
- **Analisis kebijakan terintegrasi** adalah analisis yang komprehensif yang menggabungkan tehnik atau metode untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi sebelum dan setelah tindakan kebijakan dilaksanakan.